

**ANALISIS KOMPARATIF KETIMPANGAN
WILAYAH DI INDONESIA SEBELUM DAN
SESUDAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DESENTRALIASI FISKAL
(Studi Kasus Tahun 1987-2014)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

HERLAN BASKORO

NIM.12020110141031

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Herlan Baskoro

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141031

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARATIF KETIMPANGAN WILAYAH DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL (STUDI KASUS TAHUN 1987-2014)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Miyasto, SU

Semarang, 13 Maret 2015

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Miyasto, SU)
NIP. 195012251975011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Herlan Baskoro

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141031

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARATIF KETIMPANGAN
WILAYAH DI INDONESIA SEBELUM DAN
SESUDAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DESENTRALISASI FISKAL (Studi Kasus Tahun
1987-2014)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Maret 2015

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Miyasto, SU. (.....)
2. Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, MSc., Ph.D. (.....)
3. Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Herlan Baskoro menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “ANALISIS KOMPARATIF KETIMPANGAN WILAYAH DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL (STUDI KASUS TAHUN 1987-2014)”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudiann terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

(Herlan Baskoro)
NIM: 12020110141031

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Manners Maketh Man”

(William of Wykeham)

“You’ll Never Walk Alone”

(Liverpool)

“Maka, nikmat tuhan manalagi yang kau dustakan”

(Qs. Ar-Rahman :13)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Alam Nasyrah :6-8)

“The big secret is that there’s no big secret.what ever your goal, you can get there if you’re willing to work”

(Oprah)

Untuk kedua orang tua saya dan kakak adik saya
yang saya cintai dan banggakan.

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia has a disparity region problem that increased in every year. Autonomy region and fiscal decentralization policy issued by the central government expected to solve this problem. The purpose of this study is analyze the difference of Indonesian region's disparity before and after the implementation of fiscal decentralization policy during 1987-2014 and how the effects of these policies in inequality.

This study uses Kuznets theory to viewing effect of economic growth, Wagner law to viewing effect of local taxes ratio, growth pooled theory to viewing effect of decentralization degree and government expenditure theory. This study uses time series data with multiple regression model equations. To determine the difference of Indonesian region's disparity uses by Chow test.

The result of this study indicates the difference structure of regional disparities before and after the implementation of fiscal decentralization policy by viewing influence of dummy variable or view by F-count $2.120394 > F$ table 2,069 from the results of the Chow test. In the main model of disparity more affected than in the comparative model of disparity. In reducing region disparity, it requires a high increase of economic growth area and equity oriented.

Keywords: Region, Disparity, Fiscal, Descentralization, Indonesia.

ABSTRAK

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki masalah ketimpangan wilayah yang setiap tahunnya selalu meningkat. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat diharapkan mampu mengatasi masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan pola ketimpangan wilayah di Indonesia sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal selama periode tahun 1987-2014 dan bagaimana pengaruh dari kebijakan ini terhadap ketimpangan.

Penelitian ini menggunakan teori kuznet dalam melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, hukum wagner dalam melihat pengaruh rasio pajak daerah, teori kutub pertumbuhan dalam melihat pengaruh derajat desentralisasi, dan teori pengeluaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu dengan persamaan model regresi berganda. Untuk mengetahui perbedaan pola ketimpangan wilayah, penelitian ini menggunakan uji Chow.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia. Lalu terdapat perbedaan pola ketimpangan wilayah sebelum dan sesudah kebijakan desentralisasi fiskal, dengan melihat pengaruh dari variabel dummy desentralisasi dan dengan melihat nilai F-hitung $2.120394 > F$ tabel 2,069 dari hasil uji Chow. Pada model utama ketimpangan wilayah lebih mempengaruhi ketimpangan dibanding pada model komparatif ketimpangan wilayah. Dalam menurunkan ketimpangan wilayah dibutuhkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berorientasi pada pemerataan.

Kata Kunci: Daerah, Ketimpangan, Fiskal, Desentralisasi, Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Komparatif Ketimpangan Wilayah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Tahun 1987-2014)”*. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan. Namun, berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Hadi Sasana S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
3. Hastarini Dwi Atmanti, SE, M.Si, selaku dosen wali terbaik yang selalu memberikan bimbingan, doa, dan perhatiannya selama dibangku kuliah untuk penulis dan teman-teman perwalian.
4. Prof. Dr. H. Miyasto, SU selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memotivasi, memberikan masukan, saran serta kritik yang membangun yang sangat-sangat berguna bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Seluruh staf, pegawai serta seluruh civitas akademik yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas seluruh bantuannya.

7. Kedua orang tua Drs. Mujiyono, M.Si, dan Ambarwati,S.Pd yang telah berjuang untuk mendidik secara keras, dan selalu mewajibkan untuk belajar terus menerus.
8. Harry Prayogo dan Hilman Prasjojo atas dukungan yang selalu membantu kegiatan perkuliahan penulis.
9. Anisa Fazri Ayuningtyas yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan pengertian selama ini. Terima kasih sudah mau bersama dan berbagi selama ini.
10. Teman seperjuangan di kampus, kosan, dan tempat bermain Alfian Wahyu Fauzan dan Zen Nasuha yang telah memberikan keceriaan, semangat, motivasi, dan pengalaman selama penulis menjalankan studi di Universitas Diponegoro Semarang.
11. Teman senasib seperantauan Yudha Aditya,Izhar Aduardo Raisid, Naufal Gardito, Lutfhi, Alfian Wahyu Fauzan dan Zen Nasuha yang selalu memberikan kegilaan dan pengalaman yang tidak terlupakan.
12. Teman magang Janwar, Tiko, Eko, Andi, Alfian, Zen, Jessica yang selama 1 bulan berbagi keceriaan dalam menjalani masa magang di Bank Indonesia Thamrin.
13. Teman diskusi Janwar, Tiko, Andi, Sandi, Aris, Jessica, Intan yang selalu membagi ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman bermain, diskusi, berbagi pengalaman fitri andriani dan satrio fremanando.
15. Keluarga besar IESP 2010 Reguler 2 Jarot, Alfian, Ayu, Zen, Veby, Agus, Indra, Uray, Huda, Abdil, Janwar, Lukman, Tiko, Eko, Andi, Jaya, Gery, Hanggoro, Fauzani, Dewi Utami, Qiqik, Novia, Silvera yang telah memberikan warna tersendiri baik dalam studi di IESP maupun dalam penulisan skripsi. Serta teman IESP 2010 lainnya yang tidak bisa dituliskan satu per satu.
16. Kakak-kakak IESP angkatan 2009 Anggi, Mudas, Ainun, Nesya, Barjo, Ovi, Yoga yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis.

17. Keluarga besar HMJ IESP Undip Reguler 2 Periode 2011-2012 untuk kerja samanya selama berorganisasi.
18. Keluarga besar HMJ IESP Undip periode 2012-2013 untuk kerja samanya selama berorganisasi, terutama Janwar yang telah mengarahkan teknis berorganisasi.
19. Teman-teman KKN Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, atas kebersamaannya selama 35 hari.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 13 Maret 2015

Penulis

(Herlan Baskoro)
NIM: 12020110141031

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRISPI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Reasearch Gap.....	7
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Desentralisasi Fiskal.....	14
2.1.1.1 Model Desentralisasi Tiebout.....	14
2.1.1.2 Desentralisasi Fiskal Oates.....	14
2.1.1.3 Sistem Hubungan Pusat Dan Daerah	15
2.1.1.4 Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.....	16
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah.....	17
2.1.2.1 Teori Neoklasik	17
2.1.2.2 Teori Kuznet.....	18
2.1.3 Perhitungan Ketimpangan Wilayah.....	19
2.1.3.1 Indeks Williamson.....	19
2.1.3.2 Indeks Gini	20
2.1.4 Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi	21
2.1.5 Teori Pemungutan Pajak Dan Pengeluaran Pemerintah.....	22

2.1.5.1	Teori Peacock dan Wiesman	22
2.1.5.2	Hukum Wagner	23
2.1.5.3	Model Pengeluaran Pemerintah Rostow Dan Musgrave	23
2.1.6	Derajat Desentralisasi Fiskal	24
2.1.6.1	Teori Kutub Pertumbuhan	24
2.1.7	Penyamaan Tahun Dasar PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	25
2.2	Kerangka Pemikiran Teoretis.....	29
2.3	Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	33
3.1.1	Variabel Penelitian	33
3.1.2	Definisi Operasional	33
3.2	Jenis dan Sumber data	34
3.3	Metode Pengumpulan Data	35
3.4	Metode Analisis.....	35
3.4.1	Chow Test	38
3.5	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	39
3.5.1	Deteksi Multikolinearitas	39
3.5.2	Deteksi Autokorelasi	40
3.5.3	Deteksi Heteroskedastisitas	41
3.5.4	Deteksi Normalitas	41
3.6	Pengujian Statistik.....	42
3.6.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42
3.6.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F-Statistik).....	43
3.6.3	Uji Signifikansi Parsial (Uji t-Statistik).....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1	Ketimpangan Antar Wilayah Di Indonesia	46
4.1.2	Pertumbuhan Ekonomi	47
4.1.3	Rasio Pajak Daerah	49
4.1.4	Derajat Desentralisasi Fiskal	51
4.1.5	Transfer Dana Bantuan Pemerintah Pusat.....	53
4.2	Hasil Analisis Data.....	54
4.2.1	Hasil Uji Chow.....	58
4.3	Perbandingan Model	59
4.4	Interpretasi Hasil dan Pembahasan	61
BAB V Penutup		66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Keterbatasan Penelitian	67
5.3	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Hubungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1993-2013 (Dalam Persen)	5
Tabel 1.2 <i>Research Gap</i>	8
Tabel 2.1 Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah.....	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Kondisi Ketimpangan Wilayah Di Indonesia.....	46
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1987-2014 (persen) .	48
Tabel 4.3 Rasio Pajak Daerah Di Indonesia Tahun 1987-2014 (Persen)	50
Tabel 4.4 Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Tahun 1987-2014 (Persen)	52
Tabel 4.5 Transfer Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Juta)	53
Tabel 4.6 Model Utama Ketimpangan Wilayah	56
Tabel 4.7 Model Komparatif Ketimpangan Wilayah.....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Chow.....	59
Tabel 4.9 Perbandingan Model	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Transfer Dana Perimbangan (DAU,DAK,DBH) Antara Pusat Dan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2001-2014	4
Gambar 2.1 Hipotesis Kuznets “U-Terbalik”	18
Gambar 2.2 Kurva Lorenz.....	20
Gambar 2.3 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	22
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Awal Dan Perhitungan Rasio	71
A1 Data Awal	72
A2 Perhitungan Indeks Williamson, perhitungan Indeks Williamson juga berlaku di tahun yang lain	74
A3 Rasio Pajak Daerah	75
A4 Derajat Desentralisasi	76
A5 Rasio Dana Bantuan Pemerintah Pusat	77
Lampiran B Data Struktur <i>Time Series</i>	78
Lampiran C Hasil Estimasi Regresi dan Uji Asumsi Klasik Model Utama Ketimpangan Wilayah	81
C1 Hasil Regresi Model Utama Ketimpangan Wilayah	82
C2 Uji Normalitas	82
C3 Uji Autokorelasi	83
C4 Uji Heteroskedastisitas	83
C5 Uji Multikolinearitas	83
Lampiran D Hasil Estimasi Regresi Model Komparatif Ketimpangan Wilayah ...	87
D1 Hasil Regresi Model Komparatif Ketimpangan Wilayah Sebelum Desentralisasi Fiskal	88
D2 Hasil Regresi Model Komparatif Ketimpangan Wilayah Sesudah Desentralisasi Fiskal	89
Lampiran E Hasil Uji Chow Model Ketimpangan Wilayah Sebelum dan Setelah Kebijakan Desentralisasi Fiskal Tahun 1987-2014	90
E1 Uji Chow	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau yang memiliki berbagai macam karakteristik wilayah di dalamnya. Perbedaan karakteristik seperti letak geografis dan kekayaan alam yang dimiliki oleh tiap daerah berdampak pada perbedaan pola pembangunan ekonomi di setiap wilayah. Daerah yang memiliki sumber penerimaan yang banyak dan letak geografisnya cenderung ke pusat, pembangunan ekonominya relatif lebih baik. Berbeda dengan daerah yang letaknya berada jauh dari pusat dan sumber penerimaannya sedikit pembangunan ekonominya cenderung lebih lambat. Perbedaan-perbedaan tersebut yang diindikasikan mengakibatkan terjadinya ketimpangan antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Dalam tahap awal proses pembangunan, banyak kendala yang dihadapi oleh negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Pada awal masa setelah kemerdekaan, pembangunan yang dilakukan cenderung berorientasi di pusat. Daerah yang berada jauh dari pusat cenderung memiliki perbedaan dalam hal kemajuan dalam pembangunan. Myrdal (1957) menjelaskan dalam teori efek terbalik, pembangunan di daerah yang kaya akan membuat daerah miskin semakin terbelakang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya efek terbalik antara lain perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah maju, pola aliran modal di daerah maju lebih terjamin,

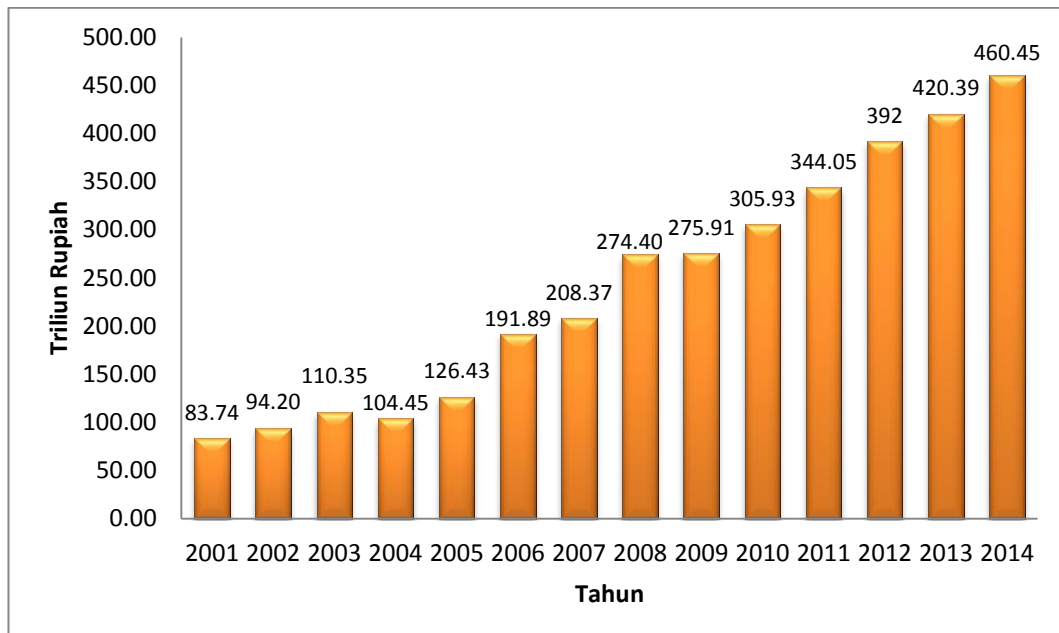
dan sarana prasarana yang memadai. Seperti teori yang dikembangkan oleh Myrdal, kondisi ini sama seperti permasalahan yang terjadi di Indonesia. Pembangunan yang bersifat sentralistis dan tingginya migrasi penduduk ke daerah yang perputaran modalnya lebih baik akan membuat pembangunan di daerah lain lebih lambat dibanding daerah yang berada dekat dengan pusat. Masalah ketimpangan ini akan terus terakumulasi menjadi konflik seperti ketidakpuasan masyarakat di daerah yang justru membuat perselisihan antar masyarakat dengan pemerintah seperti kasus gerakan separatis di Aceh dan Papua.

Pada era pemerintahan orde baru proses pembangunan cenderung bersifat sentralistis, pemerintah pusat memiliki wewenang penuh dalam proses pembangunan. Kebijakan ini justru membuat ketimpangan semakin melebar, karena kebijakan yang dikeluarkan seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tidak sesuai dengan kondisi yang dialami daerah. Menurut studi Davey (1989) ada tiga faktor yang menyebabkan pemerintahan Indonesia bersifat sentralistis, pertama adanya kekhawatiran pemerintah mengenai persatuan nasional dan kekuatan-kekuatan memecah yang timbul karena kurang stabilnya keadaan pada awal kemerdekaan. Kedua, permasalahan dalam pemeliharaan kestabilan politik dan pembagian sumber daya alam antar daerah. Ketiga, pemerintah pusat ingin memegang kendali yang kuat jalannya pembangunan ekonomi.

Setelah berakhirnya masa orde baru pemerintah mengeluarkan kebijakan demi menjaga kesetabilan integrasi nasional. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan produk kebijakan yang bertujuan untuk

mengurangi permasalahan ketimpangan yang terjadi. Menurut Mardiasmo (2004), otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Landasan hukum kebijakan ini diatur oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah. Dalam implementasinya kedua undang-undang ini menimbulkan masalah baru. Dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah justru menimbulkan sesuatu yang kompetitif dengan daerah lain. Untuk meminimalisir celah permasalahan yang ada maka pemerintah merevisi undang-undang tersebut dengan mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan pusat-daerah. Dalam implementasinya kedua undang-undang tersebut masih memiliki kekurangan di dalamnya antara lain belum jelasnya kewenangan antara pusat dan daerah, penerimaan yang bersumber dari kekayaan alam proporsinya masih lebih besar dikuasai oleh pusat dibanding daerah yang memiliki sumber daya alamnya, dan masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Lalu peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah UU No 23 Tahun 2014. perubahan ini bertujuan demi tercapainya peraturan yang sesuai dengan kondisi negara saat ini.

Gambar 1.1
Transfer Dana Perimbangan (DAU,DAK,DBH) Antara Pusat Dan Daerah Tahun 2001-2014 (Triliun Rupiah)



Sumber: DPJK, Diolah

Sesuai dengan dasar peraturan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal UU No 25 Tahun 1999, pemerintah pusat memberikan bantuan fiskal berupa transfer dana perimbangan kepada daerah. Tujuan bantuan ini agar daerah dapat menguatkan kemampuan fiskalnya dan mengurangi ketimpangan antar daerah lainnya. Pos dana perimbangan ini antara lain diisi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dalam tahap pembangunan ekonomi (Mangkoesebroto, 1993). Dalam tahap awal pembangunan, peran yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah besar dalam membangun berbagai sarana seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Dalam tahap menengah peran pemerintah masih dikatakan besar karena dalam tahap ini

pengeluaran ditujukan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari transfer dana perimbangan antara pusat dan daerah setelah implementasi kebijakan otonomi daerah tiap tahunnya selalu meingkat. Pada awal tahun 2001 pemerintah memberikan dana sebesar Rp 83,74 Triliun, lalu dana tersebut selalu meningkat sampai akhir tahun 2013 sebesar RP 430,39 Triliun. Dengan pemberian bantuan dana ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun daerahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Tabel 1.1
Hubungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia Tahun 1993-2013 (Dalam Persen)

Tahun	Gini ratio	Pertumbuhan Ekonomi
1993	0,34	6,56
1996	0,35	7,82
1998	0,32	-13,13
1999	0,31	0,79
2001	0,31	3,45
2003	0,32	4,78
2007	0,37	6,32
2010	0,38	6,20
2013	0,41	5,80

Sumber: BPS Indonesia, diolah

Pada Tabel 1.1 diperlihatkan hubungan Gini Ratio dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gini ratio adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (Todaro, 2011). Hubungan Gini ratio dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkorelasi positif, hal ini dapat dijelaskan pada tahun 1993 besaran Gini ratio Indonesia sebesar 0,34 dan naik menjadi 0,35 pada tahun 1995. Pada tahun 1998 besaran Gini ratio turun menjadi 0,32 dan terus turun menjadi 0,31

pada tahun 1999. Hal ini diikuti oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1993 sebesar 6,56 persen menjadi 0,79 persen. Adanya penurunan tersebut dikarenakan terjadi guncangan ekonomi nasional pada tahun 1998-1999. Setelah era krisis, pemerintah memulai masa *recovery* dengan mulai memberlakukan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk mengurangi ketimpangan dan membenahi perekonomian. Pada awal implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perbaikan menjadi 3,45 persen, tetapi hal ini justru diikuti oleh kenaikan ketimpangan menjadi 0,31. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik sampai akhir tahun 2013 menjadi 5,8 persen, namun ketimpangannya justru semakin memburuk menjadi 4,1.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan ketimpangan yang dialami oleh Indonesia pada era sebelum dan setelah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Pemberian dana perimbangan setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tetapi hal ini diikuti pula oleh ketimpangan yang semakin meningkat. Ketimpangan yang terjadi setelah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal justru semakin memburuk dibanding sebelum implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Walaupun demikian, keadaan perekonomian Indonesia tiap tahunnya semakin membaik. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya pemerataan dalam pendistribusian pendapatan di tiap daerah. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berjudul

“Analisis Komparatif Ketimpangan Wilayah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Tahun 1987-2014”.

1.1.2 Research Gap

Penelitian Mulyanto Sudarmono (2006) tentang analisis transformasi struktural pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di wilayah pembangunan I Jawa Tengah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Berbeda dengan Sylvenky Pyrico (2011) yang meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Ding Lu (2002) dengan studinya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, efisiensi dana alokasi, dan kesejahteraan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di China, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di China.

Penelitian Jing Jin dan Heng-fu Zou (2000) tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Cina. Dinyatakan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di China. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Simonsen Sianturi (2011) tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Utara menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006) tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antar wilayah di Negara Kolombia dan

Iriana Slinko (2002) tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Rusia mengambil variabel derajat desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Berbeda dengan Alfiona Yoana (2014) dengan studinya tentang analisi kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di era desentralisasi fiskal di Jawa Timur menjelaskan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan di Jawa Timur.

Penelitian Adiwan Aritenang (2011) tentang ketimpangan wilayah di Indonesia pasca desentralisasi menjelaskan bahwa transfer dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Berbeda dengan penelitian Adhitya Wardhana (2013) tentang dampak transfer pemerintah pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia menjelaskan bahwa transfer dana perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.

Tabel 1.2
Research Gap

No	Permasalahan	Research Gap	Peneliti	Judul
1	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Jawa Tengah	Mulyanto Sudarmono (2006)	Analisis transformasi struktural pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di wilayah pembangunan I Jawa Tengah

Tabel 1.2
Lanjutan

2	Hubungan Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera Barat	Sylvenky Pyrico (2011)	Dampak Desentralisasi fiskal terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera Barat
		Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di China	Ding Lu (2002)	<i>Rural–urban income disparity: impact of growth, allocative efficiency, and local growth welfare</i>
		Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di China	Jing Jin dan Heng-fu Zou (2000)	<i>Fiscal Decentralization and Economic Growth In China</i>
3	Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan	Pajak Daerah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Wilayah di Sumatera Utara	Simonsen Sianturi (2011)	Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah di Sumatera Utara
		Derajat Desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di negara Kolombia	Jaime Bonet (2006)	<i>Fiscal decentralization and regional income disparities: evidence from the Colombian experience.</i>

Tabel 1.2
Lanjutan

4	Hubungan Transfer Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan	Derajat Desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah di negara Rusia	Iriana Slinko (2002)	<i>The Impact of Fiscal Decentralization on the Budget Revenue Inequality among Municipalities and Growth of Russian regions.</i>
		Derajat Desentralisasi fiskal yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Jawa Timur	Alfiona Yoana (2014)	Analisis kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di era desentralisasi fiskal di Jawa Timur
		Transfer Dana Perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Ketimpangan Wilayah Indonesia	Adiwan Aritenang (2011)	<i>A Study on Indonesia Regions Disparity: Post Decentralization</i>
		Transfer Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Adhitya Wardhana (2013)	Dampak Transfer Pemerintah Pusat terhadap penurunan ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Sumber: Berbagai Jurnal Ekonomi Pembangunan

1.2 Rumusan Masalah

Ketimpangan wilayah merupakan masalah yang sering dialami oleh banyak negara berkembang di dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Pemerintahan yang sentralistis mengakibatkan pembangunan menjadi terpusat. Daerah yang secara geografis jauh dari pusat mengalami pembangunan yang berbeda dengan pusat, dan hal ini membuat ketimpangan semakin melebar.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah dalam membangun daerahnya. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat daerah menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada pusat.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disusun pertanyaan sebagai berikut, antara lain :

- 1) Bagaimana perbedaan pola ketimpangan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal ?
- 2) Bagaimana pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah ?
- 3) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, rasio pajak daerah, derajat desentralisasi, dan rasio transfer dana bantuan pemerintah pusat terhadap ketimpangan wilayah di era sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

- 1) Menganalisis perbedaan pola ketimpangan wilayah sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal.
- 2) Menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah.
- 3) Menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi, rasio pajak daerah, derajat desentralisasi, dan rasio transfer dana bantuan pemerintah pusat dalam mempengaruhi ketimpangan wilayah di era sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal.

Kegunaan penelitian ini antara lain :

Bagi penulis dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas pengetahuan Ilmu Ekonomi. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam rangka memanfaatkan fenomena desentralisasi fiskal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang, masalah penelitian, *research gap*, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini dijelaskan tentang kondisi ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia pada era sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan antara lain: Teori Ekonomi Publik (Teori Kuznet, Hukum Musgrave, dan Teori Rostow dan Musgrave) dan Teori Ekonomi Regional (Teori Kutub Pertumbuhan). Selain itu bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoretis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan variabel penelitian yang digunakan dan dilengkapi dengan definisi operasional variabel. Pada bab ini dijelaskan pula jenis dan sumber data, metode pengumpulan, data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi dari objek penelitian, hasil dan pembahasan hasil penelitian. Hasil perhitungan diinterpretasikan dan dijelaskan sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan dan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

2.1.1.1 Model Desentralisasi Tiebout

Tiebout (1952) menyatakan, bahwa individu memiliki mobilitas bebas dalam menyeleksi komunitas berdasarkan preferensi barang publik yang disediakan pemerintah daerah. *Tiebout Sorting* menjelaskan tentang individu yang bebas memilih daerah tinggalnya berdasarkan kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan barang publik yang ada, utilitas maksimal akan tercapai berdasarkan preferensi masing-masing individu. Desentralisasi fiskal secara tidak langsung memunculkan kompetisi antar daerah otonom dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana daerah dengan pelayanan yang baik akan memaksimalkan utilitas masyarakat (konstituen) dengan pilihan politiknya (dikutip oleh Sumarsono, 2009).

2.1.1.2 Desentralisasi Fiskal Oates

Menurut Oates (1993), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi, menurut Oates hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan

infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran perbelanjaan sehingga hal ini lebih efisien karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya. (dikutip oleh Sasana, 2006)

2.1.1.3 Sistem Hubungan Pusat dan Daerah

Menurut Davey desentralisasi merupakan delegasi tanggung jawab penyerahan kekuasaan dan kewenangan kepada badan atau organisasi untuk membuat keputusan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Efektivitas dan jangkauannya tergantung dari tiga variabel, yaitu: luas dan berat tanggung jawab yang dipikul pemerintah daerah, tersedianya sumber-sumber keuangan yang memadai, derajat kebijaksanaan dalam melaksanakan dan mengalokasikan sumber-sumber keuangannya (Sasana, 2009)

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah.

3. Tugas Perbantuan

Penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan daerah di bawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

2.1.1.4 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tercermin oleh kebijakan fiskal daerah tersebut, sehingga kebijakan keuangan daerah perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran dan pemasukan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Pemasukan daerah diupayakan untuk selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus se-efisien mungkin. Untuk diperlukan pengendalian terhadap penggunaan dana sehingga sumber-sumber pendapatan daerah dapat dialokasikan se-efisien mungkin.

Perimbangan keuangan merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Di dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari (Haryanto, 2010) :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 3) Pinjaman daerah.
- 4) Lain-lain penerimaan yang sah.

Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah

2.1.2.1 Teori Neoklasik

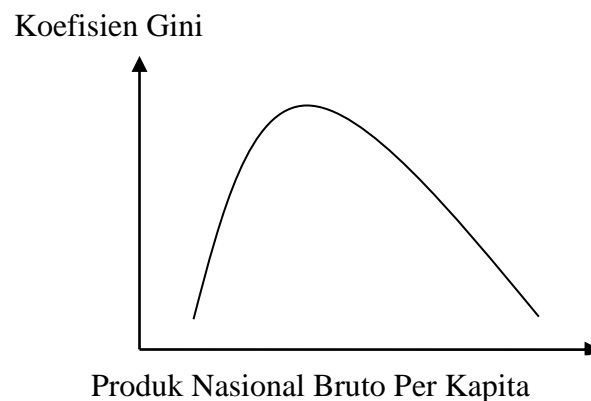
Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik memunculkan permasalahan tentang ketimpangan wilayah. Dalam teori tersebut timbul sebuah hipotesa yang dikenal sebagai Hipotesa Neoklasik, Hipotesa Neoklasik memprediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2012). Berdasarkan

hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah.

2.1.2.2 Teori Kuznet

Simon Kuznet menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun hal ini akan berangsur membaik pada tahap selanjutnya. Observasi ini kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern (Todaro, 2011).

Gambar 2.1
Hipotesis Kuznets “U-Terbalik”



Sumber: Todaro (2011)

Kuznets menitikberatkan pada perubahan struktural yang terjadi pada pembangunan ekonomi. Ketika peranan sektor industri semakin meningkat, maka terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri modern termasuk industri pengolahan dan jasa. Dalam transisi ekonomi ini, produktivitas tenaga kerja pada sektor modern lebih tinggi daripada produktivitas sektor pertanian

sehingga pendapatan per kapita pada sektor modern juga akan lebih tinggi. Hasilnya, ketimpangan antara kedua sektor itu semakin meningkat pada tahap awal pembangunan dan kemudian menurun pada tahap selanjutnya.

2.1.3 Perhitungan Ketimpangan Wilayah

2.1.3.1 Indeks Williamson

Indeks williamson pertama kali dikemukakan oleh Jeffry G Williamson (1965). Jeffry G Williamson menjelaskan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrijal, 2012). Formulasi Indeks Williamson sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad 0 < V_w < 1 \quad (2.1)$$

Keterangan:

V_w = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita daerah i

y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

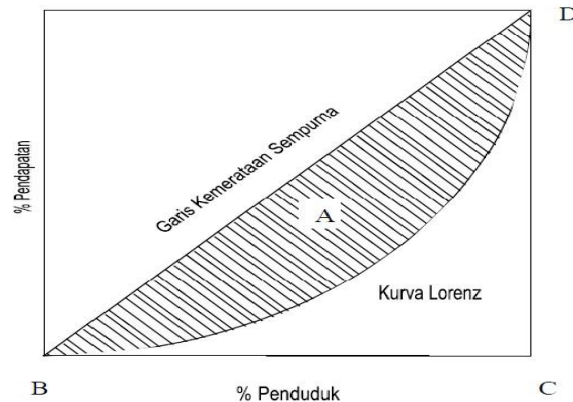
n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati nol berarti sangat merata.

2.1.3.2 Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan antar individu yang memiliki angka koefisien kisaran dari 0 (kemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketimpangan sempurna) (Todaro, 2011). Indeks gini dapat diukur secara grafis melalui kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai koefisien maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sebaliknya semakin rendah nilai koefisien Gini maka semakin merata pula distribusi pendapatannya.

Gambar 2.2
Kurva Lorenz



Sumber: Todaro (2001)

Selanjutnya, Todaro (2011) juga menjelaskan metode lain untuk menganalisis ketimpangan pendapatan adalah kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang mereka terima selama 1 tahun. Semakin jauh jarak kurva lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan

sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Indeks Gini seringkali ditampilkan bersamaan dengan kurva Lorenz, yang menggambarkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase populasi. Indeks Gini dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$G = \sum_{t=1}^{n-1} \mu_{t+1} \pi_t - \sum_{t=1}^{n-1} \mu_t \pi_{t+1} \quad (2.2)$$

Keterangan:

G = gini rasio

μ_t = persentase pendapatan

π_t = persentase populasi

2.1.4 Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

$$G = \frac{PDB_a - PDB_i}{PDB_i} \times 100 \% \quad (2.3)$$

Keterangan:

G = pertumbuhan (*growth*)

PDB a = PDB ADHK suatu tahun

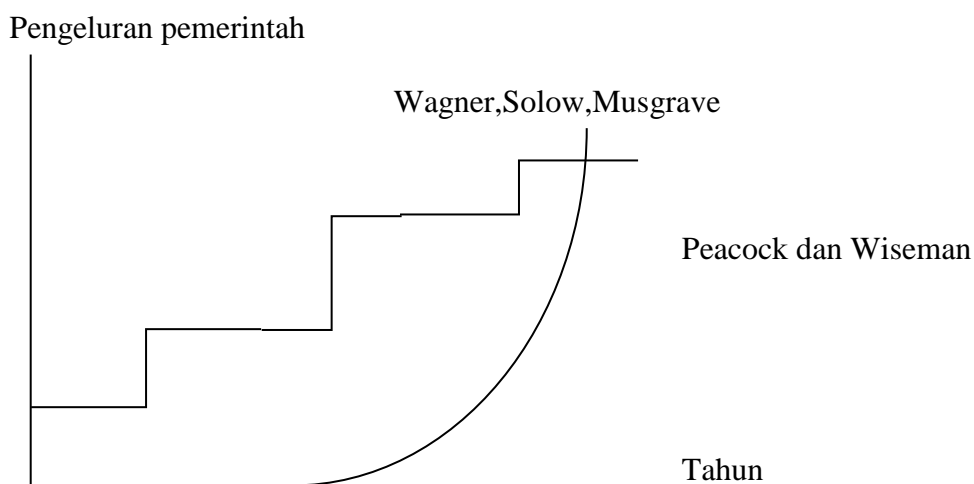
PDB i = PDB ADHK tahun sebelumnya

2.1.5 Teori Pemungutan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah

2.1.5.1 Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasari oleh keinginan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Masyarakat mempunyai tingkat toleransi dalam membayar pajak. Tingkat toleransi ini yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pajak. Inti dari teori ini, perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak akan meningkat walaupun tarif pajak tidak meningkat. Meningkatnya pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat, naiknya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah meningkat akan menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat (Mangkusbroto, 1993).

Gambar 2.3
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Sumber : Mangkusubroto (1993)

Peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan memerlukan dukungan anggaran untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Alokasi dana ini digunakan oleh pemerintah guna membangun infrastruktur yang penting yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Peningkatan ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga bisa membiayai kebutuhannya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

2.1.5.2 Hukum Wagner

Menurut Adolf Wagner, pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang melakukan pembiayaan. Adolf wagner menyebut dengan *The Law of Ever Increasing State Activity* atau hukum selau meningkatnya kegiatan negara atau hukum makin meningkatnya pengeluaran negara. Hukum ini didasari dalam pengamatannya di Negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Menurut Wagner, dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Mangkusoebroto, 1993)

2.1.5.3 Model Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pengembangan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar disebabkan pemerintah harus menyediakan infastruktur. Pada tahap

menengah, investasi yang dilakukan oleh pemerintah masih tetap besar dan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas, dan peran investasi pihak swasta mulai meningkat. Pada tahap lanjut, aktivitas pengeluaran pemerintah akan bergeser ke arah aktivitas sosial (Mangkusoebroto, 1993).

2.1.6 Derajat Desentralisasi Fiskal

2.1.6.1 Teori Kutub Pertumbuhan

Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak terjadi secara merata tetapi hanya di tempat-tempat tertentu yang memiliki fasilitas memadai dan dengan intensitas pertumbuhan yang berbeda. Hal ini dapat diindikasikan bahwa daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi merupakan titik-titik pertumbuhan daerah di sekitarnya. Tetapi hal ini mempunyai konsekuensi akan menimbulkan daerah-daerah yang tertinggal disekitarnya. Dalam kenyataannya derajat desentralisasi fiskal tiap daerah mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dari presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).

Tabel 2.1
Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah

Skala	Persentase PAD thdp TPD	Kualifikasi
1	0,00 % - 10,00 %	Sangat Kurang
2	10,01 % - 20,00 %	Kurang
3	20,01 % - 30,00 %	Sedang
4	30,01 % - 40,00 %	Cukup
5	40,01 % - 50,00 %	Baik
6	> 50,00 %	Sangat Baik

Sumber: Tim Fisipol UGM (2001)

Derajat desentralisasi fiskal adalah suatu cara untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah. Jika persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar 0%-10% maka daerah tersebut digolongkan sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskalnya sangat kurang. Jika persentasenya Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya berkisar melebihi dari 50% maka daerah tersebut digolongkan sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskalnya yang sangat baik.

2.1.7 Penyamaan Tahun Dasar PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000

Dalam penelitian ini data PDRB perkapita provinsi seluruh Indonesia dikonversikan atas dasar harga konstan tahun 2000. Karena periode penelitian ini adalah dari tahun 1993-2013 maka supaya konsisten data penelitian sebelum tahun 2000 dan masih menggunakan tahun dasar 1993 harus diubah/dikonversi menjadi bertahun dasar 2000. Adapun langkah-langkah untuk menyamakan tahun dasar adalah sebagai berikut :

- 1) Mencari satu data/angka yang dihitung dengan menggunakan dua tahun dasar, misalnya data PDRB tahun 2001 yang diukur dengan tahun dasar 1993 dan tahun dasar 2000.
- 2) Setelah itu untuk menjadikan semua data PDRB perkapita ADHK 2000, kita harus menentukan sebuah angka pengkali, yaitu data PDRB perkapita tahun 2001 ADHK 2000 dibagi dengan data PDRB perkapita tahun 2001 ADHK 1993. Angka hasil pembagian tersebut dikalikan dengan semua data PDRB perkapita menurut tahun dasar 1993 dan data tersebut ADHK 2000.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Jurnal/ Judul Penelitian	Dependen/ Independen Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten (Trias Dewi, 2012)	Variabel Independen: pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia Variabel Dependen: Ketimpangan wilayah	Metode regresi data panel, <i>Pearson Correlation</i> , Indeks Williamson	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah, Indeks pembangunan manusia berpengaruh negative terhadap ketimpangan
2	Analisi Dampak Kebijakan Otonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Kawasan Tahun 1995-2009 Ciayumajakuning (Anggun C Siptarana, 2010)	Variabel Independen: pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi, rasio belanja pemerintah, IPM, Tenaga kerja Variabel Dependen: ketimpangan	Metode regresi panel data, indeks Entrophie Theil, indeks Wilcoxon	Variabel rasio belanja pembangunan berpengaruh negatif signifikan dengan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah dan variabel tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan wilayah. variabel pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan ipm berpengaruh tidak

				signifikan terhadap ketimpangan wilayah.
3	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (Budiantoro Hartono, 2008)	Variabel Independen: investasi swasta, alokasi dana pembangunan, rasio angkatan kerja Variabel Dependen: ketimpangan pembangunan	Menggunakan metode <i>OLS (ordinary Least Square)</i> , Indeks Williamson	investasi swasta, alokasi dana pembangunan, rasio angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan
4	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia Tahun 2001-2005 (Joko Waluyo, 2007)	Variabel Independen: pengeluaran pemerintah DAU, DBH (DBHP dan DBHSDA) dan desentralisasi fiskal. Variabel Dependen: ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi	Menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan <i>Two Stage Least Square (TSLS)</i>	Dana bagi hasil PBB BPHTB dan PPh menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dana bagi hasil SDA (DBSDA) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif. DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan efektif dalam menurunkan ketimpangan
5	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (studi kasus KAB/KOTA Provinsi Sumatera Utara) Tahun 2004-	Variabel Independen: Desentralisasi fiskal (DF), Tenaga Kerja (TK), Pajak Daerah (PD), dan Aglomerasi (Ag)	Metodenya menggunakan analisis regresi persamaan simultan (<i>simultaneous equation regresion model</i>) dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (DF, PD, TK, AG) signifikan

	2008 (Y. Simonsen S, 2010)	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi (PE), Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah dan Ketimpangan Wilayah (KW).	model Berulang (<i>Recursive Models</i>) dan Kuadrat Terkeci. Model akan diregresi menggunakan metode OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) dengan data panel,	mempengaruhi variabel dependen. pertumbuhan ekonomi daerah signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah. Pajak daerah signifikan berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.
6	Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2001-2010 (Adhitya W, Bambang J, Hermanto S dan Kodrat W)	Variabel Independen: DAU, DAK, Karakteristik Daerah, Kondisi Jalanan, <i>hold harmless</i> , Jumlah Populasi. Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan	Menggunakan <i>Williamson Index</i> dan regresi panel data	DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan <i>hold harmless</i> dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
7	Analisi Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008 (Yuki Angelia, 2010)	Variabel Independen: PDRB per kapita, investasi, aglomerasi. Variabel Dependen: ketimpangan pembangunan	Menggunakan regresi OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) dengan variabel dummy time series desentralisasi fiskal	PDRB per kapita dan aglomerasi berpengaruh positif signifikan, investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan

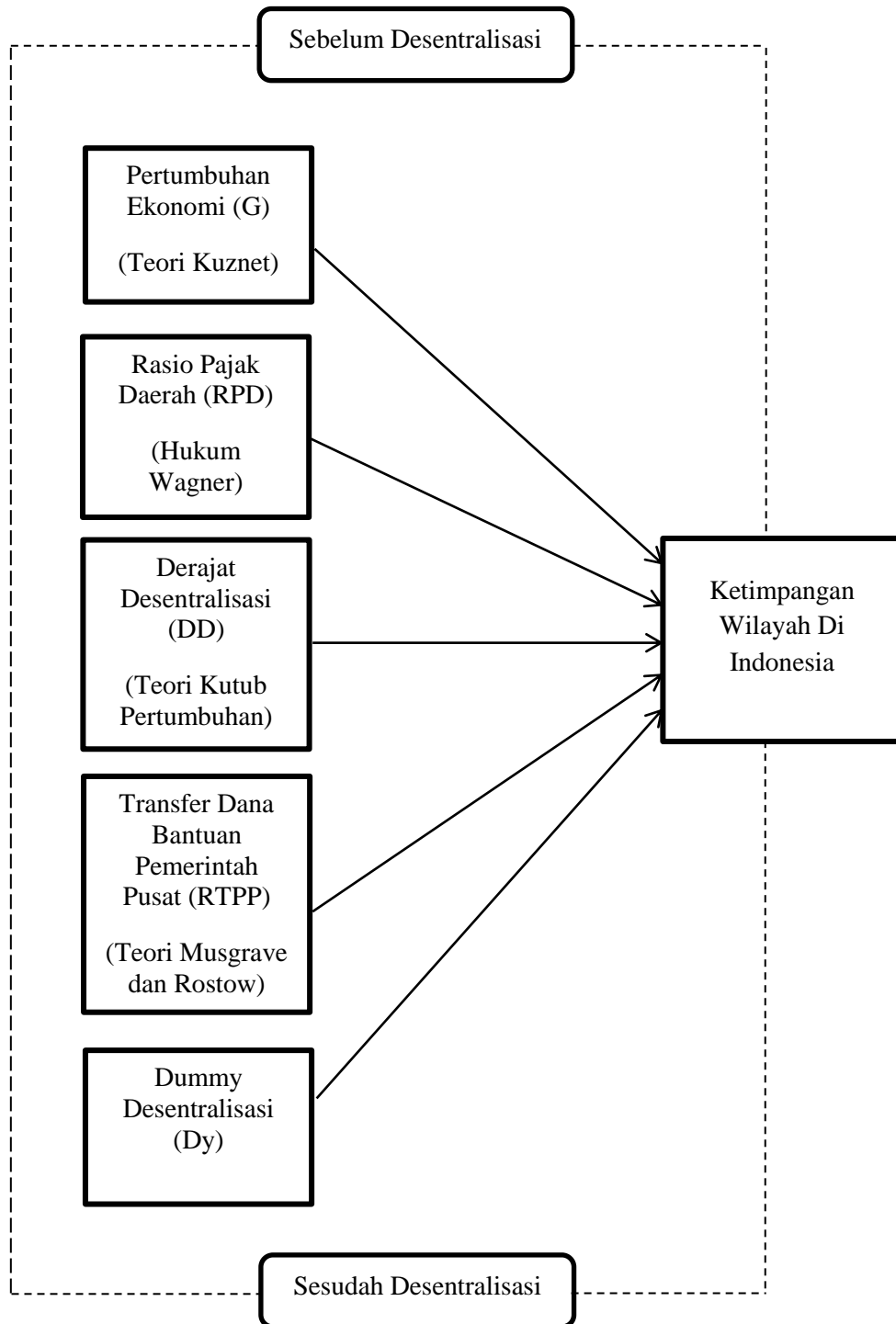
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan perbedaan kondisi yang berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Indonesia sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penggunaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki pengaruh terhadap kondisi ketimpangan di Indonesia. Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pertumbuhan ekonomi, rasio pajak daerah, derajat desentralisasi, dan rasio dana bantuan pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan teori ekonomi publik dan teori ekonomi regional. Teori ekonomi publik yang dipakai dalam penelitian ini antara lain, teori Kuznet dipakai dalam menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah, lalu teori tentang pengeluaran pemerintah Rostow dan Musgrave digunakan dalam melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah. Hukum wagner digunakan dalam melihat hubungan rasio pajak terhadap ketimpangan wilayah. Teori ekonomi regional yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kutub pertumbuhan digunakan dalam melihat kemandirian suatu daerah.

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut gambar kerangka pemikiran yang sistematis:

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah, sesuai dengan teori kuznet ketika kegiatan pembangunan terus berlanjut maka pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan yang terjadi.
- 2) Diduga variabel rasio pajak daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. Wagner mengemukakan dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita harus dikontrol oleh pemerintah, agar dapat menekan angka ketimpangan antar wilayah. Peranan pemerintah melalui pemungutan pajak dibutuhkan untuk memperlancar arus distribusi pendapatan ke daerah-daerah yang pertumbuhannya rendah
- 3) Diduga variabel derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah. Semakin tinggi derjat desentralisasi maka daerah tersebut diindikasikan sudah mandiri. Tetapi kutub pertumbuhan tidak secara merata ada di setiap daerah dengan intensitas yang sama.
- 4) Diduga variabel rasio transfer dana bantuan pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah, tujuan dari pemberian transfer dana

bantuan pemerintah pusat adalah untuk membantu daerah dalam membangun daerah masing-masing agar dapat mengurangi ketimpangan.

- 5) Diduga terdapat pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia pada periode tahun 1988-2013.
- 6) Diduga terdapat perbedaan pola ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Varibel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel indpenden. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan wilayah, sedangkan untuk variabel independennya adalah pertumbuhan ekonomi, rasio pajak daerah, derajat desentralisasi, dan rasio transfer dana bantuan pemerintah pusat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data *time series* Indonesia dari tahun 1987 – 2014.

3.1.2 Definisi operasional

- 1) Ketimpangan wilayah, dalam pengukuran ketimpangan wilayah di Indonesia menggunakan indeks Williamson dengan mendasarkan pada pengukuran menggunakan PDRB ADHK tanpa Migas dan jumlah penduduk di wilayah indonesia. Digunakannya PDRB tanpa migas sebagai hitungan, karena dilihat dari setiap daerah tidak semua memiliki sumber daya mineral dan gas.
- 2) Pertumbuhan ekonomi, diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDB per kapita menurut harga konstan tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai perubahan PDB atas dasar harga konstan di Indonesia (dalam satuan persen) atau disebut laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$G = \frac{PDB_a - PDB_i}{PDB_i} \times 100 \% \quad (3.1)$$

Keterangan:

G = pertumbuhan (*growth*)

PDB a = PDB ADHK suatu tahun

PDB i = PDB ADHK tahun sebelumnya

- 3) Rasio Pajak Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio dari total penerimaan pajak daerah terhadap PDB. Hal ini bertujuan untuk melihat kapasitas fiskal daerah.
- 4) Derajat Desentralisasi Fiskal adalah suatu ukuran kemampuan daerah dalam mengelola fiskalnya. Derajat desentralisais fiskal dapat diukur dari persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan (TPD).
- 5) Transfer Dana Bantuan Pemerintah Pusat adalah rasio total transfer dana bantuan pemerintah pusat terhadap total belanja yang dilakukan daerah untuk membangun daerahnya. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh kontribusi transfer dana bantuan pemerintah pusat dapat mempengaruhi pembangunan daerah melalui belanja pemerintah daerah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan data deret waktu (*time-series data*) untuk kurun waktu tahun 1987-2014 meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Data sekunder yang dipakai meliputi data pertumbuhan ekonomi, rasio pajak daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio transfer dana bantuan pemerintah pusat. Secara umum data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Dirjen Perimbangan

Keuangan (DPJK) lalu informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengambilan data dari lembaga-lembaga terkait, yaitu BPS Indonesia dan Dirjen Perimbangan Keuangan (DPJK) dan pustaka lain yang digunakan sebagai pelengkap yaitu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data dengan pendekatan model Regresi OLS (*Ordinary Least Square*). Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dan memiliki pengaruh kepadanya. Variabel yang akan diestimasi adalah variabel terikat, sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas (Gujarti, 2010). Model ini memperlihatkan hubungan variabel bebas (*Independent Variable*) dengan variabel terikat (*Dependent Variable*), dimana digunakan untuk melihat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, rasio pajak, desentralisasi fiskal, rasio transfer dana bantuan pemerintah pusat, dan variabel dummy. Adapun penambahan variabel dummy untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah. Untuk memperoleh gambaran secara umum

mengenai hasil penelitian ini serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk pemecahan permasalahan yang dikemukakan, dapat dilihat melalui persamaan fungsi:

$$Y_t = f(G, RPD, DD, RTPP, Dy) \quad (3.2)$$

Fungsi di atas kemudian di estimasi ke dalam bentuk persamaan linier sebagai berikut:

Model Utama Ketimpangan Wilayah

$$KW_t = \beta_0 + \beta_1 G_t + \beta_2 RPD_t + \beta_3 DD_t + \beta_4 RTPP_t + \beta_5 dummy + \mu_t \quad (3.3)$$

Keterangan:

KW_t adalah Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 1987-2014

G_t adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia Tahun 1987-2014

RPD_t adalah Rasio Pajak Daerah di Indonesia Tahun 1987-2014

DD_t adalah Derajat Desentralisasi seluruh provinsi di Indonesia Tahun 1987-2014

$RTPP_t$ adalah Rasio Transfer Dana Bantuan Pemerintah Pusat di Indonesia Tahun 1987-2014

$Dummy$ adalah variabel dummy desentralisasi fiskal

μ_t adalah komponen error di waktu (t)

Untuk melihat perbedaan dari pengaruh variabel di era sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal maka dibuat model komparatif ketimpangan wilayah. Model ini sebagai dimasukan sebagai model tambahan dan bertujuan untuk menjawab perbedaan ketimpangan melalui uji Chow.

Model Ketimpangan Wilayah Sebelum Desentralisasi

$$KW_t = \beta_0 + \beta_1 G_t + \beta_2 RPD_t + \beta_3 DD_t + \beta_3 RTPP_t + \mu_t \quad (3.4)$$

KW_t adalah Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 1987-1999

G_t adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia Tahun 1987-1999

RPD_t adalah Rasio Pajak Daerah di Indonesia Tahun 1987-1999

DD_t adalah Derajat Desentralisasi seluruh provinsi di Indonesia Tahun 1987-1999

$RTPP_t$ adalah Rasio Transfer Dana Bantuan Pemerintah Pusat di Indonesia Tahun 1987-1999

μ_t adalah komponen error di waktu (t)

Model Ketimpangan Wilayah Sesudah Desentralisasi

$$KW_t = \beta_0 + \beta_1 G_t + \beta_2 RPD_t + \beta_3 DD_t + \beta_3 RTPP_t + \mu_t \quad (3.5)$$

KW_t adalah Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 2001-2014

G_t adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia Tahun 2001-2014

RPD_t adalah Rasio Pajak Daerah di Indonesia Tahun 2001-2014

DD_t adalah Derajat Desentralisasi seluruh provinsi di Indonesia Tahun 2001-2014

$RTPP_t$ adalah Rasio Transfer Dana Bantuan Pemerintah Pusat di Indonesia Tahun 2001-2014

μ_t adalah komponen error di waktu (t)

Persamaan di atas merupakan model yang akan digunakan dalam penelitian yang akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik sebelum desentralisasi fiskal maupun setelah desentralisasi fiskal. Dalam menghitung ketimpangan wilayah dapat menggunakan perhitungan Indeks

Williamson. Untuk memperoleh angka ketimpangan maka dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad 0 < V_w < 1 \quad (3.6)$$

Keterangan:

V_w = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita daerah i

y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar.

3.4.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah ada pola perbedaan dalam suatu peristiwa atau kejadian (Gujarati, 2010). Sesuai dengan penilitan ini, uji chow digunakan untuk melihat *structural break* atau perbedaan struktur pola dari ketimpangan wilayah sebelum dan setelah implementasi kebijakan otonomi daerah dan desntralisasi fiskal.

$$F = \frac{RSS_r - RSS_{ur}/k}{(RSS_{ur})/(n1+n2-2k)} \quad (3.7)$$

Keterangan:

$RSSr$ = Nilai restricted residual sum of squares (1987 s/d 1999) – (2001 s/d 2014)

$RSSur$ = $RSS1(1987 \text{ s/d } 1999) + RSS2(2001 \text{ s/d } 2014)$

$n1$ = Jumlah sampel sebelum desentralisasi fiskal

$n2$ = Jumlah sampel setelah desentralisasi fiskal

k = Jumlah parameter yang diestimasi

Jika nilai F hitung $> F$ tabel maka hipotesis nol ditolak dan menyimpulkan bahwa model regresi relevansi nilai sebelum periode desentralisasi fiskal dan model regresi relevansi nilai sesudah periode desentralisasi fiskal memang berbeda.

3.5 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji terlebih dahulu sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan asumsi klasik maka digunakan pengujian statistik non parametrik. Sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik. Model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

3.5.1 Deteksi Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model yang antara variabel independennya tidak terjadi korelasi, tetapi jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2005). Pengujian ini dapat menggunakan dua cara yaitu *auxiliary regressions* dan *Klien's rule of thumb* untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 *auxiliary regressions* maka di dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

3.5.2 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi antar variabel itu sendiri pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya terjadi pada data *time series* di mana data sekarang dipengaruhi data yang lalu (Gujarati, 2010). Autokorelasi antar error yang dihasilkan menyebabkan prediksi yang dilakukan dengan OLS menjadi tidak efisien walaupun *unbiased* dan konsisten. Masalah autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan *Breusch-Godfrey Correlation LM* (LM test).

$$H_0: \rho = 0$$

$$H_1: \rho \neq 0$$

Kriteria uji:

$Obs \cdot R\text{-Square} < \text{nilai } \chi^2 \text{ tabel}$, maka terima H_0

$Obs \cdot R\text{-Square} > \text{nilai } \chi^2 \text{ tabel}$, maka tolak H_0

Apabila nilai *Obs*R-squared*-nya lebih kecil dari taraf nyata tertentu (terima H_0) maka persamaan tersebut tidak mengandung unsur autokorelasi. Gujarati (2010) menyatakan bahwa walaupun nilai koefisien *Durbin-Watson* tidak berubah akan tetapi penyesuaian terhadap autokorelasi telah dilakukan dan

persamaan dianggap telah bebas dari masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.5.3 Deteksi Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Ghozali, 2005). Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan *Uji White*. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (u_i^2) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 , untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$. Kriteria yang digunakan adalah apabila χ^2 tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai *Obs*R-squared*, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.

3.5.4 Deteksi Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Ghozali, 2005). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera (J-B) Test* dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode *J-B Test*, apabila *J-B* hitung < nilai χ^2 (Chi-Square) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.

3.6 Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (uji t).

3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2010). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas.
2. Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5 persen, dengan rumus (Gujarati, 2010):

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(N - k)} \quad (3.8)$$

Keterangan :

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen

N : jumlah sampel

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah :

$$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)} \quad (3.9)$$

$$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0 \text{ (ada pengaruh)} \quad (3.10)$$

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai F hitung dengan F tabel menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_1 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.6.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan dalam pengujian statistik untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)}$$

$H_1 : \beta_i \neq 0$ (ada pengaruh)

$$T_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)} \quad (3.11)$$

Keterangan :

$Se(\beta_i)$ = Standar error dari b

β_i = Koefisien regresi

Kesimpulan:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka tolak H_0 terima H_1 , artinya X_i (variabel-variabel bebas pada persamaan) berarti berpengaruh nyata terhadap Y (variabel *dependent*/ variabel tidak bebas).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka terima H_0 tolak H_1 , artinya X_i (variabel-variabel bebas pada persamaan) tidak berpengaruh nyata terhadap Y (variabel tidak bebas).